

Proyek pembangunan jalan lintas selatan dalam pelaksanaannya melewati tanah sawah, pekarangan, tegal, rumah maupun tanaman yang berada di atas tanah milik penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka harus melaksanakan kebijakan dari pemerintah, dengan cara melepas hak atas tanah yang dimiliki. Padahal tanah tersebut selama ini digunakan untuk mendukung produksi pertanian, tempat berdirinya rumah dan berbagai aktivitas di dalamnya serta pembagian waris. Melalui pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, petani mendapatkan hasil ganti rugi yang berupa uang tergantung dari luas tanah dan bangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan pada salah satu wilayah yang dilewati oleh proyek jalan lintas selatan yaitu di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah Bagaimana bentuk strategi adaptasi pasca pembebasan lahan. Dalam melihat strategi adaptasi petani pasca pembebasan lahan, penulis menjadikan pemanfaatan atas hasil ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman yang dilakukan petani sebagai acuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data metode kualitatif. Pengumpulan data selain menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengamatan juga didukung oleh data sekunder dari instansi pemerintah. Wawancara dilakukan pada 22 subjek penelitian yang terbagi menjadi, antara lain: 6 orang dari *pamong* desa, 1 orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, dan 15 orang petani dan buruh tani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor pendorong petani melepaskan kepemilikan tanah untuk pembangunan jalan lintas selatan: perasaan sebagai *wong cilik* yang harus patuh kepada pemerintah, adanya isu-isu jika melawan terhadap pembebasan tanah maka akan diambil alih oleh negara dengan cuma-cuma, adanya faktor alam yang menyebabkan ketidaksesuaian tanah untuk ditanami dan tanah yang sering dilewati banjir, mengikuti teman-teman sesama petani yang mendapatkan ganti rugi, dorongan atau usulan dari *Pak Inggih* agar melepaskan kepemilikan tanah, pemenuhan kebutuhan hari raya Idul Fitri, adanya anggapan jika harga tanah akan naik dan muncul keramaian yang cocok untuk berwirausaha (bisnis).

Konflik tertutup sebagai bentuk protes petani terhadap pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah antara lain: pemerintah tidak adil dalam pembagian hasil ganti rugi dan eksekusi pembebasan lahan, pemerintah memanfaatkan waktu mendekati Hari Raya Idul Fitri untuk membagikan hasil ganti rugi, ketidakkompakan petani menimbulkan kerenggangan hubungan di antara petani, pemerintah desa tidak mendengar aspirasi warganya.

Pemanfaatan uang hasil ganti rugi oleh petani yang bervariasi, merupakan hasil dari ide-ide yang dimilikinya. Dengan uang tersebut, petani dapat memilih dan memutuskan secara sadar dan aktif sebagai usaha penyesuaian (adaptasi). Adapun strategi adaptasi petani pasca pembebasan lahan, antara lain:

1. Kepemilikan dan Penguasaan tanah baru.
2. Menabung di Bank Jatim untuk biaya pendidikan anak.
3. Alih profesi ke dalam bidang jasa.
4. Renovasi dan membangun rumah.
5. Membeli hewan ternak.
6. Membeli alat transportasi darat.

**Kata kunci:** Petani, Pembangunan, Pedesaan, Pembebasan Tanah

xvi